

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. (2010). Perda bernuansa syariah dan hubungannya dengan konstitusi. *Jurnal Hukum*, 119-142.
- Ambarwati, V. (2012). Fenomena prostitusi di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. *Dimensia*, 71-85.
- Bahjatul, H. d. (2016). Perda berbasis syariah dan hubungan Negara-Agama dalam perspektif Pancasila. *Muzzahib*, 151-167.
- Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Faisal, I. (2001). *Islam (Transformasi sosial dan kontinuitas sejarah)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya (Anggota IKAPI).
- Gunawan, Y. K. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kasus prostitusi di wilayah hukum DIY. *Repository.umy.ac.id*.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jati, W. R. (2013). Permasalahan implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah. *Al-Manahij*.
- Laporan Tahunan Pelaksana Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, 2018.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Ma'mun, M. A.-B. (2018). *Politik Perda Syariat (Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, implementasi, dan evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ramadhani, H. W. (2012). Geliat pekerja seks dibawah tekanan Perda Kabupaten Bantul. 135-162.
- Roihan, I. M. (2016). Analisis peraturan daerah bernuansa syariah dalam tatanan hukum di Indonesia.
- Salim, A. (2001). *Teori paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudartyo, J. E. (2008). Proses pembentukan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sumaryadi. (2005). *Efektivitas implementasi kebijakan Otonomi Daerah*.
- Syafie, I. K. (1999). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rieneka.
- Tarjo. (2019, Januari 3). Efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. (D. A. Samhani, Interviewer)
- Wahyuni, E. (2015). Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1956 tentang penanggulangan pelacuran di Kota Semarang.
- Widiastuti, I. (2010). Respon stakeholder terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.
- Winarno, B. (2002). *Teoridan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuliani, S. (2014). Analisis isi Perda tentang prostitusi : tinjauan dari perspektif gender dan hak asasi manusia. *Spirit Publik*.